

Sarat Masalah, UU Pilkada Harus Direvisi

PELAKSANAAN Pilkada Serentak 2015 menyisakan banyak kelemahan yang harus segera direvisi. Di antaranya regulasi biaya kampanye yang seluruhnya ditanggung KPU, dinilai menguntungkan incumbent. Selain itu belum adanya sanksi tegas bagi pelaku praktik money politics serta belum jelasnya mekanisme pencalonan. Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2015 juga mengalami penurunan dibanding Pileg dan Pilpres 2014, yang hanya sebesar 69 persen. Fenomena ini menunjukkan kegagalan partai politik mengusung calon kepala daerah yang menarik.

Fenomena lain yang terjadi di Pilkada 2015 lalu adalah pemilih lebih memilih figur calon daripada melihat partai pengusung. Hal itu dibuktikan banyaknya calon kepala daerah yang tetap bisa menang meski berpindah parpol. "Fenomena ini menunjukkan kegagalan partai politik mengikat konstituen," kata Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Fisip UMY) Bambang Eka Cahya Widodo SIP MSi dalam Focus Group Discussion Indonesian Politics Outlook 2016 di kampus UMY.

Anggota DPD RI dari DIY Anfan Hadikusumo mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pasangan tunggal melaju di Pilkada 2015, juga menyisakan permasalahan lain, seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman. Meskipun maksudnya baik, untuk menyelamatkan calon tunggal potensial serta menghindari penundaan, namun ternyata masih menyisakan celah munculnya permasalahan. "UU Pilkada perlu sekali direvisi," katanya.

Masalah lain yang banyak dikeluhkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2015 adalah maraknya uang mahar. Hal itu diakui oleh Wakil Ketua DPRD DIY yang juga Ketua Tim Pemenangan Pilkada DIY Partai Gerindra Dharma Setiawan yang merasakan sulitnya negosiasi dengan parpol, lebih-lebih kepada incumbent, saat mengajukan calonnya sebagai wakil bupati. Dijelaskan, jika popularitas calon tersebut tinggi, uang maharnya akan kecil. Namun jika si calon tidak punya modal sosial atau popularitas maka uang maharnya akan sangat besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa koalisi terbentuk bukan dari proses politik yang benar, namun berdasar uang mahar politik. "Saya berharap, uang mahar ini dibasmi karena sangat merusak," katanya.

Fenomena menarik lainnya dari Pilkada Serentak 2015 adalah tingginya keterpilihan perempuan yang mencapai 37,1%. Data menunjukkan, dari 124 calon perempuan yang maju pilka-

LAPORAN AKHIR TAHUN

POLITIK

da, 46 perempuan terpilih menjadi kepala daerah. Namun yang masih menjadi pertanyaan publik, apakah keterpilihan perempuan tersebut didapat dari usaha kerasnya sendiri atau berkat dari nama besar dinasti (politik kekeluargaan).

Menurut Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY Dr Titin Purwaningsih MSi, dari 23 perempuan yang menjadi kepala daerah 10 di antaranya terpilih karena politik kekerabatan. Namun tidak semua kepala daerah yang berasal dari politik kekerabatan, berkualitas jelek. Masih banyak kepala daerah perempuan yang mampu menunjukkan prestasi. "Kualitasnya tidak jauh beda antara yang berasal dari politik kekerabatan dengan yang tidak," katanya.

Tata Kelola Pemerintahan

Dalam tata kelola pemerintahan Indonesia tahun 2015, juga masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antardaerah.

Menurut Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY Dr Titin Purwaningsih MSi, tingginya *governor indeks* DIY yang mencapai angka 6,5% tidak diikuti daerah lain seperti Maluku yang hanya 3%. "Ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan tata kelola pemerintah antara daerah di Jawa dengan Luar Jawa," kata Titin.

Tahun depan pemerintah pusat lebih meningkatkan performa tata kelola pemerintahan terutama daerah Luar Jawa, dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan, tahun 2015 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah lokal, setelah diberlakukannya secara penuh UU Nomor 34 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU pemerintah daerah ini mengubah fungsi anggota DPRD menjadi seperti pejabat daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Melalui UU ini, pemerintah pusat ingin menjadikan pemerintah daerah sebagai pondasi dalam mendorong pembangunan nasional. "Pemerintah daerah saat ini menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional," katanya.

Untuk mempercepat pembangunan, kata Arif, pemerintah telah membentuk Tim Pendampingan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) disetiap jajaran kejaksaan. Keberadaan TP4D ini sangat diperlukan supaya pemerintah daerah tidak ragu-ragu dalam penggunaan dana, sehingga roda pembangunan bisa bergerak. Namun kebijakan pelimpahan pembangunan kepada masing-masing daerah tidak diikuti perimbangan keuangan pusat dan daerah. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu direvisi. "Saya berharap DPD bisa memperjuangkan revisi UU tersebut," kata Arif.

Sedangkan Anne Permatasari mengatakan, masih banyak permasalahan di tengah masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Di antaranya belum tuntasnya pembahasan RUU kawasan tanpa rokok, belum efektifnya Perda Laktasi untuk memfasilitasi para ibu menyusui serta tidak adanya kebijakan dari pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

Menurut Anne, pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan menyebabkan ledakan penduduk dan berimbas pada munculnya permasalahan sosial seperti pernikahan usia dini, meningkatnya angka gugatan perceraian serta angka kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun juga akan memunculkan penyakit masyarakat seperti maraknya praktik prostitusi serta meningkatnya angka pengguna narkoba. "Kebijakan pengendalian jumlah penduduk harus diprioritaskan karena akan menjadi pijakan bagi kebijakan-kebijakan yang lain. □ - c.

Pojok KR

Yogya masih belum terbebas dari macet.
-- **Pejabatnya tak perlu mundur.**

'Pak Ogah' perlu ditertibkan.
-- **Jangan malah pura-pura tak tahu.**

Para dosen dituntut lebih produktif.
-- **Menghasilkan karya atau uang?**

Berabe